

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2021

BALAI POM DI GORONTALO



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Interim Triwulan II tahun 2021 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan Good governance dan Clean government. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 merupakan laporan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Periode Triwulan 2 dari April 2021 sampai dengan Juni 2021 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sudah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan, Selama triwulan I tahun 2021, sejumlah capaian kinerja triwulan yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Gorontalo tahun 2021 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Gorontalo triwulan I tahun 2020 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Interim Balai POM di Gorontalo triwulan I Tahun 2021. Sebagai bentuk pengejawantahan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Gorontalo.

Gorontalo, 17 Juli 2021
Kepala Balai POM di Gorontalo



Agus Yudi Prayudana, S.farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	8
1.4.1 Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)	8
1.4.2 Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo).....	11
1.5 ISU STRATEGIS.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2021-2024.....	29
2.2. INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2021.....	30
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	33
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	35
2.5. METODE PENGUKURAN	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE II TAHUN 2021.....	40
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	75
BAB IV PENUTUP	78
4.1. KESIMPULAN	78
4.2. SARAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu 2021 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

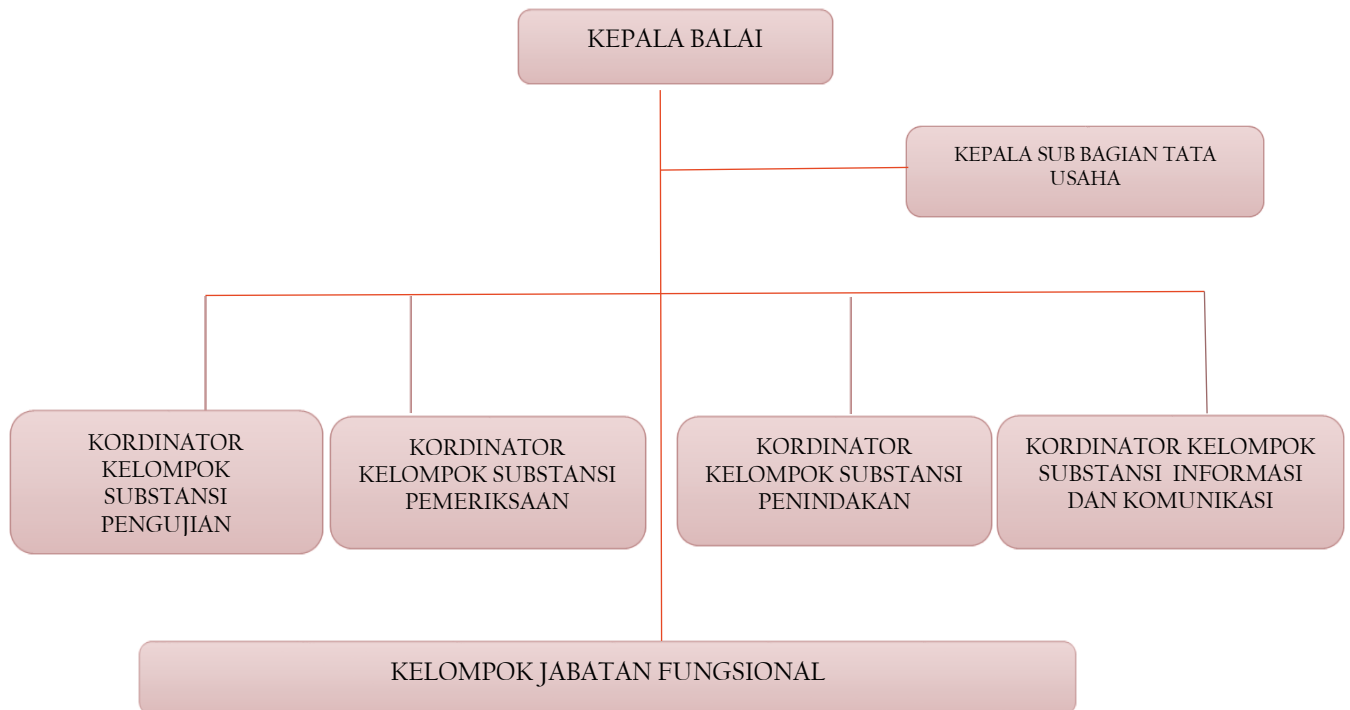
1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Gorontalo disusun berdasarkan Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Yang di undangkan Pada Tanggal 7 September 2020.

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Kelompok Subtansi.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan
2. Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
3. Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
4. Kelompok Substansi Penindakan mempunyai Tugas intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan dan penindakan, seksi informasi komunikasi, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula, seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| 1. Kantor Lama (POS POM) | : | 333 m ² |
| 2. Kantor Baru | : | 5.630,12 m ² |

b. Luas Bangunan

- | | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 1. Kantor Lama | : | 100 m ² |
| 2. Kantor Baru | : | 2.277,60 m ² |

c. Status Kepemilikan Tanah

- | | | |
|----------------|---|------------------------|
| 1. Kantor Lama | : | Hak Milik Badan POM RI |
| 2. Kantor Baru | : | Hak Milik Badan POM RI |

d. Rumah Dinas : 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan

- | | | |
|-----|---|---------|
| PLN | : | 130 KVA |
|-----|---|---------|

f. Sarana Komunikasi

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. No. Telepon | : | (0435)822052, 08114355155 |
| 2. Nomor Faximili | : | (0435) 822052 |
| 3. Alamat e-mail | : | ulpk_gorontalo@yahoo.co.id
bpom_gorontalo@pom.go.id |
| 4. Jaringan Internet | : | Icon+ dan Indihome |

g. Sumber air

1. PDAM

2. Sumur Bor

h. Kendaraan (Laik Pakai)

1. Kendaraan Roda Empat

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a. Suzuki APV Arena GL | :Tahun Perolehan 2008 |
| b. Toyota Rush | :Tahun Perolehan 2009 |
| c. Kijang Innova G | :Tahun Perolehan 2010 |
| d. Kijang Innova V | :Tahun Perolehan 2013 |
| e. Isuzu | :Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling) |
| f. Suzuki APV Pick Up | :Tahun Perolehan 2016 |
| g. Daihatsu | :Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling) |
| h. Kijang Innova Q | : Tahun Perolehan 2019 |

2. Kendaraan Roda Dua

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Kawasaki | :Tahun Perolehan 2007 |
| b. Yamaha Jupiter Z | :Tahun Perolehan 2009 |
| c. Yamaha Xeon | :Tahun Perolehan 2014 |

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 31 Desember 2021 adalah 46 orang, 2 orang sementara mengikuti tugas belajar di tambah 24 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| - Tata Usaha | : 11 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Pengujian | : 21 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Infokom | : 5 Pegawai |
| - Pemdak | : 9 Pegawai |

b. Pegawai NON PNS

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Satpam | : 5 Orang |
| - Pramubakti | : 7 Orang |
| - Pramubakti Laboratorium | : 5 Orang |
| - Cleaning Service | : 3 Orang |

- Sopir : 4 Orang

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 46 Pegawai (2 pegawai tugas belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Strata Dua (S.2) : 2 Orang
2. Apoteker : 15 Orang
3. Strata Satu (S.1) : 16 Orang
4. Diploma Tiga (D.3) : 13 Orang

j. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 14.419.727.000,-(empat belas miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp 6.326.602.358,- (28,55%).

1.4.2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)
- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)

❖ Desa : 663 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km²
5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

d. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar \pm 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama \pm 6 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo Ke Kabupaten Bone Bolango \pm 2 Jam, Kabupaten Gorontalo \pm 1,5 Jam, Kabupaten Gorontalo Utara \pm 3 Jam, Kabupaten Boalemo \pm 4 Jam dan Kabupaten Pohuwato \pm 6 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 482 sarana dengan rincian sebagai berikut:

a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 24
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	: 458 +
TOTAL	: 482

1.5. ISU STRATEGIS

1. COVID 19

Balai POM di Gorontalo melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Gorontalo mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Gorontalo) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19.

Disisi lain Balai POM Gorontalo menjadi Laboratorium Penguji COVID-19 di Provinsi Gorontalo dan untuk selanjutnya Sampel Spesimen akan dilakukan pengujian di Laboratorium Mikrobiologi BPOM di Gorontalo sehingga pemerintah Daerah tidak Lagi mengirimkan sample/spesimen di Labkesda di Makassar.

2. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai

POM di Gorontalo masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

3. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti demand untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai POM di Gorontalo agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (iii) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/ berisiko terhadap kesehatan.

4. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Adanya revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun hal lainnya. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah pemanfaatan teknologi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam sistem pengawasan BPOM di Gorontalo dimana tren penjualan produk obat dan makanan ilegal juga semakin bervariasi dan meningkat. Penggunaan teknologi dalam

penyebaran produk obat dan makanan ilegal dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang terutama bagi masyarakat yang belum memahami tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan produk obat dan makanan ilegal tersebut. BPOM di Gorontalo melihat revolusi industri 4.0 ini juga sebagai peluang untuk pemanfaatan teknologi dengan layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial yang ada, seperti Subsite, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan media lainnya. Selain itu BPOM di Gorontalo juga secara rutin membuat konten terkait Obat dan Makanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menangkal hoax yang beredar.

5. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan

daya jangkau BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat

memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasaan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No	Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar	No	Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan
1	Pengawasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, SKPD, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab;	1	Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) agar dapat melakukan produksi sesuai CPMB dan dapat melakukan usaha dan menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing.
2	Pelaksanaan pengawasan yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah, kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan;		
3	Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi;		
4	Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal;		

- | | |
|---|---|
| 5 | Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan |
| 6 | Perlindungan masyarakat terhadap cemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan; |

6. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dampak lain adalah banyak industri farmasi yang akan melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, maka

akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, Balai POM di Gorontalo juga harus lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan *post-market* terhadap mutu obat beredar termasuk farmakovigilans utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

7. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *Free Trade Area*, *ASEAN-China Free Trade Area*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpotensi besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan

lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang

sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan data Balai POM di Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati beberapa kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, masih terdapat hasil uji laboratorium pada tahun 2021 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS).

8. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan subsektor makanan, minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap *output* nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Balai POM di Gorontalo untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang terkait industri makanan dan minuman), *health and primary education* (sumber daya manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari Balai POM di Gorontalo akan semakin berat dan sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.

9. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan *post-market*.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Gorontalo tahun 2019 (41 sarana produksi Obat dan Makanan, 803 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

10. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah 1.168.190 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 585.210 jiwa sementara Perempuan berjumlah 582.980 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2019).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 158.333 atau Laju Pertumbuhannya 2,81 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo sebesar 374.923 atau Laju Pertumbuhannya 0,55 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 153.991 atau Laju Pertumbuhannya 2,40 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 157.186 atau Laju Pertumbuhannya 1,25 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 112.975 atau Laju Pertumbuhannya 1,03 %, dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 210.782 atau Laju Pertumbuhannya 2,10 %.

11. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

12. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari kebutuhan. Padahal, Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan, baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan sehingga produk-produk farmasi semakin banyak yang beredar yang menjadi objek pengawasan.

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat termasuk seluruh wilayah kabupaten, Kota Provinsi Gorontalo sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya.

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat

menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu,antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

13. Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan,

pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

14. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2021-2024

Visi Balai POM di Gorontalo 2021-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan

efektllitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaan untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;*
2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;*
3. *Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;*
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.*

2.2. INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2021

Berdasarkan Penetapan kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2021 terdapat 11 sasaran kegiatan :

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Balai POM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1		<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>
		<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Gorontalo dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Gorontalo untuk tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM di Gorontalo) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi	83,60%
		Persentase Makanan yang memenuhi	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	87,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	82%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73,00%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.50%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	90%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	89.00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	60,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	3.,76%
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.83%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40%
		Jumlah desa pangan aman	12%
		Jumlah pasar aman dari Bahan Beracun	2%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	92%
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	84%
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	77%
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai	71.00%
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2%
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	94%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	90%

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel :2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1		Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	316.680.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	154.589.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	87	87	87	87	239.400.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	82	82	82	82	129.551.000
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	73	124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	-	-	-	84,5	4.362.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	-	-	-	76	150.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di	-	-	-	90	150.000.000
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	89	89	89	89	272.502.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	272.502.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	51.800.000
		Persentase sarana produksi Obat dan	55	55	55	55	88.474.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Makanan yang memenuhi ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	272.502.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	3,76	150.000.000
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83	94,83	94,83	94,83	150.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	35%	40	711.488.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	35%	80%	12	930.603.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	60%	80%	2	101.119.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5	95,5	95,5	95,5	765.353.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5	95,5	95,5	95,5	765.353.000
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	40	60	81	684.883.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo	-	-	-	92	409.573.000
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo	-	-	-	84	621.530.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo	-	-	-	77	409.573.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar CLP	-	-	-	71	Rp6.493.890.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	-	2	2	2	84.550.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	25	50	70	94	2.439.309.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	5.620.000.00

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPOM di Gorontalo. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang adalah dilakukan sebagai berikut :

1. BPOM di Gorontalo melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e – performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e- SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level indlidu secara periodic triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. BPOM di Gorontalo menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;

3. Mengunggah / mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi e-performace, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/capaianUPTtahun2021;
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan ke I Tahun 2021

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BPOM di Gorontalo dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BPOM di Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2021, capaian kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2021, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam gambar

Gambar 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2021 TW2
Sangat Kurang		<50%
Kurang	< 75	50% ≤ x < 70%
Cukup	75 - 100	70% ≤ x < 90%
Baik	100	90% ≤ x < 110%
Sangat Baik	100-125	110% < x ≤ 120%
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120%

Pada triwulan II tahun 2021 BPOM di Gorontalo telah melaksanakan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 11 sasaran kegiatan seperti pada tabel dibawah ini. Perhitungan

Capaian sasaran kegiatan Triwulan 1 Tahun 2021 tersebut adalah dihitung perbandingan antara realisasi triwulan 1 yang ditetapkan. Capaian sasaran kegiatan triwulan 1 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan BPOM di Gorontalo sd Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian NPS Tw II	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	109,2428	sangat baik
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo		
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	103,44	Sangat baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	151,759	Tidak dapat disimpulkan
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	11,352	Sangat Kurang

7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	145,83	Tidak dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal		
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	84,31	Cukup

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Kinerja BPOM di Gorontalo tahun 2021 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja .

Tabel 3.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja BPOM di Gorontalo Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Indikator TW 2	Kriteria Indikator TW 2
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	96,00%	114,83%	sangat baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	84,40%	105,50%	sangat baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00%	93,55%	107,53%	sangat baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	82%	89,47%	109,11%	sangat baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Indikator TW 2	Kriteria Indikator TW 2
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	0	0	-	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan	0%	0	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di	0%	0	-	
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	89%	100%	112,36%	Sangat Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	45%	75,00%	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	100,00 %	113,64%	sangat baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	75,00%	136,36%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	50,30%	79,84%	Cukup
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	0	0	-	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Indikator TW 2	Kriteria Indikator TW 2
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83%	96,04%	101,28%	Sangat Baik
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00%	50,00%	250,00%	Tidak Dapat
		Jumlah desa pangan aman	35%	51,60%	147,43%	Tidak Dapat
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60,00%	65,00%	108,33%	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	32,43%	33,96%	Sangat Kurang
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	10,95	11,45%	Sangat Kurang
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00%	58,33%	145,83%	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelolapemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo	0%	0	-	
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo	0%	0	-	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo	0%	0	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar	0	0	-	
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2%	1,35%	67,50%	Kurang
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	94%	80,18%	85,30%	Cukup
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	90%	75%	83,33%	Cukup

Dari 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja capaiannya “sangat baik”, 5 indikator kinerja dengan kategori “baik”, 4 indikator kinerja dengan kategori “cukup” .

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Gorontalo yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	96,00%	114,83%	sangat baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah 96,00%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 83,60%, maka capaian yang diperoleh adalah 114,83% dengan kriteria Sangat Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 ditemukan 16 sampel Tidak Memenuhi Syarat dari 338 sampel yang telah selesai diuji.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 96,00% bila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 83,60%, maka capaian yang diperoleh adalah 114,83% dan mendapatkan kriteria Sangat Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan adalah:

1. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengujian obat sehingga mampu melakukan pengujian sampel obat sesuai dengan target yang ditetapkan.
 2. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk memberikan jaminan hasil uji yang valid. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mempertahankan sertifikat akreditasi.
 3. Balai POM di Gorontalo tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi pengawasan obat dan makanan meskipun dalam kondisi pandemi dan penugasan sebagai laboratorium pemeriksa Covid-19.
 4. Pembinaan sarana produksi dan distribusi obat (CPOTB/CPKB/CDOB/CPPB) secara intensif dan berkelanjutan baik oleh unit kerja Pusat maupun Balai POM Gorontalo
 5. Penerapan Zona Integritas menuju WBK untuk mendukung penerapan sistem pemerintah Good Governance
- d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
1. Peningkatan kapasitas laboratoium pengujian meliputi penggunaan metode analisa termutakhir sesuai pedoman sampling obat tahun 2020, verifikasi metode analisa untuk menghasilkan hasil uji yang valid, mengikuti uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding, pengadaan peralatan sesuai standar minimal laboratorium, pengadaan baku pembanding/reagensia, dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium pengujian melalui pelatihan teknis.
 2. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017, yaitu dengan melakukan audit sistem manajemen mutu baik internal maupun eksternal secara berkala.

3. Komitmen untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi pengawasan obat dan makanan, dibuktikan dengan terpenuhinya capaian kinerja personil sehingga dapat mendukung capaian kinerja unit kerja. Selain itu, Balai POM di Gorontalo juga masih dapat berkontribusi dalam penanggulangan covid-19 melalui inovasi Laporan Kinerja BPOM di Gorontalo 67 Laboratorium pemeriksa covid-19 dan pemanfaatan minuman keras Cap Tikus sebagai bahan baku pembuatan handsanitizer yang mendapatkan apresiasi juara 2 dan 3 pada penganugerahan Top 21 inovasi pada masa pandemi dari Kementerian PANRB.
 4. Pengukuran kinerja secara berkala, evaluasi pengembangan kompetensi dan evaluasi manajemen SDM sebagai salah satu program tim kerja ZI menuju WBK. Pada tahun 2020 Balai POM di Gorontalo berhasil meraih predikat ZI menuju WBK dari Kementerian PANRB.
- e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	0,00	0,00	0	Efisien

Berdasarkan data tersebut capaian Indeks Efisiensi masih 0,00, hal ini disebabkan karena proses pengadaan reagensia untuk pengujian obat masih sedang berlangsung sehingga belum ada realisasi anggaran.

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	

Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	84,40%	105,50%	Baik
---	--------	--------	---------	------

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah 84,40%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 80,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 105,50% dan mendapatkan kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 ditemukan 19 sampel Tidak Memenuhi Syarat dari 127 sampel yang telah selesai diuji.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 2 adalah 84,40% bila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 80,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 105,50% dan mendapatkan criteria Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan adalah:

1. Pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan (CPPB) secara intensif dan berkelanjutan baik oleh unit kerja Pusat maupun Balai POM Gorontalo.
2. KIE kepada pelaku usaha dan konsumen, terlaksananya beberapa jenis kegiatan Balai POM di Gorontalo dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat, pelaku usaha dan konsumen melalui berbagai media.
3. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengujian makanan sehingga mampu melakukan pengujian sampel makanan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk memberikan jaminan hasil uji yang valid. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mempertahankan sertifikat akreditasi.
5. Balai POM di Gorontalo tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi pengawasan obat dan makanan meskipun dalam kondisi pandemi dan penugasan sebagai laboratorium pemeriksa Covid-19.

6. Penerapan Zona Integritas menuju WBK untuk mendukung penerapan sistem pemerintah Good Governance.
- d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
1. Pembinaan dan pemeriksaan rutin di sarana produksi dan distribusi makanan
 2. Memanfaatkan media sosial, KIE secara langsung melalui kader keamanan pangan dan peningkatan peran anggota pramuka SAKA POM, pengujian secara cepat, dan pemanfaatan inovasi SILAURA.
 3. Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian meliputi penggunaan metode analisa termutakhir sesuai pedoman sampling obat tahun 2020, verifikasi metode analisa untuk menghasilkan hasil uji yang valid, mengikuti uji profisiensi/uji kolaborasi/uji banding, pengadaan peralatan sesuai standar minimal laboratorium, pengadaan baku pembanding/reagensia, dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium pengujian melalui pelatihan teknis.
 4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017, yaitu dengan melakukan audit sistem manajemen mutu baik internal maupun eksternal secara berkala.
 5. Komitmen untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi pengawasan obat dan makanan, dibuktikan dengan terpenuhinya capaian kinerja personil sehingga dapat mendukung capaian kinerja unit kerja. Selain itu, Balai POM di Gorontalo juga masih dapat berkontribusi dalam penanggulangan covid-19 melalui inovasi Laboratorium pemeriksa covid-19 dan pemanfaatan minuman keras Cap Tikus sebagai bahan baku pembuatan handsanitizer yang mendapatkan apresiasi juara 2 dan 3 pada penganugerahan Top 21 inovasi pada masa pandemi dari Kementerian PANRB.
 6. Pengukuran kinerja secara berkala, evaluasi pengembangan kompetensi dan evaluasi manajemen SDM sebagai salah satu program tim kerja ZI menuju WBK. Pada tahun 2020 Balai POM di Gorontalo berhasil meraih predikat ZI menuju WBK dari Kementerian PANRB.

7. Terlaksananya kegiatan Desa Pangan Aman, Intervensi keamanan PJAS, Pasar aman dari bahan berbahaya, SAKA POM beraksi, Bimtek, dan Pelayanan Prima, E-registrasi Pangan olahan, Penyuluhan keamanan pangan.
- e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya**

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1,30	0,30	95 %	Efisien

Dari Tabel di atas dapat dilihat Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh nilai 0,30. Semakin rendah nilai TE maka semakin efisien suatu kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00%	93,55%	107,53%	Baik
--	--------	--------	---------	------

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah 93,55%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 87,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 107,53% dan mendapatkan kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 jumlah Obat Targeted yang telah selesai uji sebanyak 91 sampel.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah 93,55%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 87,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 107,53% dan mendapatkan kriteria Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Masih tingginya sampel obat dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan
2. Pembinaan sarana produksi dan distribusi obat (CPOTB/CDOB/CPKB) secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu produk.
3. KIE kepada pelaku usaha dan konsumen agar dapat menjadi konsumen cerdas dalam memilih produk obat. Hal ini diharapkan agar konsumen dapat berkontribusi aktif dalam memilih produk yang aman dan bermutu dan

melaporkan apabila menemukan produk obat dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

4. Peningkatan peran serta stakeholder terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan stakeholder khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat. Pada tahun 2020 telah terdapat 3 Kabupaten/Kota telah menerima DAK Non fisik pengawasan obat dan makanan.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan evaluasi penandaan obat. Penyamaan persepsi antara petugas Pusat dan Balai sangat penting dalam pengambilan keputusan terhadap penandaan produk obat. Di samping itu juga dilakukan komunikasi antara petugas Pusat dan Balai sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.
2. Dilakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat berdasarkan analisis risiko untuk memastikan pemenuhan keamanan mutu produk obat. Apabila ditemukan kondisi yang tidak memenuhi ketentuan maka sarana wajib melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan.
3. KIE keamanan dan mutu obat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dengan melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan kelompok masyarakat. Di samping KIE secara tatap muka, KIE melalui media elektronik, media cetak, dan media sosial juga gencar dilakukan.
4. Sejak tahun 2019 telah diluncurkan program DAK pengawasan obat dan makanan ke Kabupaten/Kota. Melalui program DAK Kabupaten/Kota dapat melakukan program kegiatan untuk mendukung pengawasan obat.

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2,75	1,75	78 %

Dari Tabel di atas dapat dilihat Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh nilai 1,75.. Semakin rendah nilai TE maka semakin efisien suatu kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	89,47%	109,11%	Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah 89,47%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 82%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,11% dan

mendapatkan kriteria Baik. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 jumlah Makanan Targeted yang telah selesai uji sebanyak 127 sampel.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah 89,47%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 82%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,11% dan mendapatkan kriteria Baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Pembinaan kepada sarana produksi makanan agar dapat menjamin keamanan dan mutu produk secara mandiri.
2. Pembinaan kepada sarana produksi terkait pemenuhan ketentuan pada penandaan produk makanan.
3. Masih tingginya sampel makanan dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.
4. Pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan (CPPB/CRPB) secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu produk.
5. KIE kepada pelaku usaha dan konsumen agar dapat menjadi konsumen cerdas dalam memilih produk makanan. Hal ini diharapkan agar konsumen dapat berkontribusi aktif dalam memilih produk yang aman dan bermutu dan melaporkan apabila menemukan produk makanan dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.
6. Peningkatan peran serta stakeholder terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan stakeholder khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan cakupan pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi makanan. Pada tahun 2020 telah

terdapat 3 Kabupaten/Kota telah menerima DAK Non fisik pengawasan obat dan makanan.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan evaluasi penandaan makanan. Penyamaan persepsi antara petugas Pusat dan Balai sangat penting dalam pengambilan keputusan terhadap penandaan produk makanan. Di samping itu juga dilakukan komunikasi antara petugas Pusat dan Balai sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.
2. Dilakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan berdasarkan analisis risiko untuk memastikan pemenuhan keamanan mutu produk makanan. Apabila ditemukan kondisi yang tidak memenuhi ketentuan maka sarana wajib melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan.
3. KIE keamanan dan mutu makanan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dengan melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan kelompok masyarakat. Di samping KIE secara tatap muka, KIE melalui media elektronik, media cetak, dan media sosial juga gencar dilakukan. Sejak tahun 2019 telah diluncurkan program DAK pengawasan obat dan makanan ke Kabupaten/Kota. Melalui program DAK Kabupaten/Kota dapat melakukan program kegiatan untuk mendukung pengawasan makanan.

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2,34	1,34	84 %	Efisien

Dari Tabel di atas dapat dilihat Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh nilai 1,34. Semakin rendah nilai TE maka semakin efisien suatu kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo.

A.2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak

(random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah indllidu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di *smartphone enumerator*.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun maka belum dapa dinilai.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

A.3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengeasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Indeks yang dilaksanakan diakhir tahun 2021 dengan Hasil sebagai berikut :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan maka penilaian baru dilakukan akhir tahun.

A.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan maka belum bisa dinilai

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dilaksanakan diakhir tahun maka belum bisa dinilai

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

A.4 *Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo*

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian 6 nilai indicator yaitu :

A.4.1. **Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	100%	112,36%	sangat baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan parameter yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM di Gorontalo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BPOM di Gorontalo, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BPOM di Gorontalo, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM di Gorontalo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain, dan rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BPOM di Gorontalo. Realisasi Triwulan II yaitu sebesar 100%, jika dibanding dengan target Triwulan II yang ditetapkan yakni 89% maka Capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 112,36% dengan kriteria "Sangat baik". Realisasi Jika dibanding dengan target tahun 2021 yang ditetapkan yakni 89% maka Capaian kinerja sebesar 112,36% dengan kriteria "Sangat baik". Capaian kinerja pada triwulan ini melebihi target yang ditetapkan

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Komitmen petugas dalam membuat surat keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
- Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- komunikasi dan koordinasi yang baik antar seksi di internal BPOM di Gorontalo, BBPOM dengan Pusat, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPOM di Gorontalo dengan lintas sektor seperti Dinas kesehatan
- d. Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	4,74	3,74	75 %	Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sudah dilakukan secara efisien dalam mencapai output yang ditetapkan

Adanya peningkatan kompetensi personil, mendorong peningkatan kinerja personil untuk segera menyelesaikan setiap tugas yang diberikan juga Monitoring dan evaluasi telah dilakukan perbulan sehingga target indikator yang tidak tercapai dapat segera dilakukan rencana tindak lanjut

A.4.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	45%	75,00%	Cukup
--	-----	-----	--------	-------

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan rekomendasi yang diberikan oleh BPOM di Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dan telah ditindaklanjuti.. Realisasi Triwulan II yaitu sebesar 45%, jika dibanding dengan target Triwulan II yang ditetapkan yakni 60% maka Capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 75% dengan kriteria “cukup”. Realisasi Jika dibanding dengan target tahun 2021 yang ditetapkan yakni 60% maka Capaian kinerja sebesar 75% dengan kriteria “cukup”. Capaian kinerja pada triwulan tidak memenuhi target yang ditetapkan sehingga diperlukan upaya yang lebih baik untuk mendorong pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindaklanjuti temuan/rekomendasi BPOM Gorontalo

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Terlambatnya penyampaian rekomendasi/ surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana/ pelaku usaha dan lintas sektor terkait
- Kepatuhan dari pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan petugas masih kurang, sehingga masih banyak yang belum ditindaklanjuti.
- Lambatnya tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terkait atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan
- Pandemi menyebabkan banyak kegiatan lintas sektor dialihkan untuk penanganan covid-19
- Melakukan monev berkala dan Membuat surat permintaan Tindak lanjut / CAPA kembali terhadap sarana atau Linsek yang belum melakukan TL / belum mengirim CAPA serta melakukan advokasi terhadap sarana dan lintas sektor

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Adanya Dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2021 yang mensupport pemda untuk melakukan pengawasan dan termasuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai, namun adanya pandemi menyebabkan hambatan dalam realisasinya.
- Mengirim surat tindak lanjut ke sarana dan lintas sektor melalui sarana komunikasi WA untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi, namun masih banyak sarana dan linsek yang belum menindaklanjuti
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
- Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah baik di sarana produksi maupun distribusi Obat dan Makanan

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

- Telah dilakukannya monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara berkala namun kesadaran dari sarana untuk menindaklanjuti temuan masih kurang.
- Telah dilakukan pendampingan/ bimbingan kepada pelaku usaha/ penanggung jawab sarana dalam membuat tindakan perbaikan dan pencegahan melalui konsultasi langsung atau melalui WA, sehingga diharapkan mendorong peningkatan feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan

Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status

9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	3,16	2,16	75 %	Efisien
---	--	------	------	------	---------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah dilakukan secara efisien dalam mencapai output yang ditetapkan

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Nama Indikator	Volume			kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	100,00%	113,64%	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II yaitu sebesar 100%, jika dibanding dengan target Triwulan II yang ditetapkan yakni 88% maka Capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 113,64% dengan kriteria "sangat baik". Realisasi Jika dibanding dengan target tahun 2021 yang ditetapkan yakni 88% maka Capaian kinerja sebesar 113,64% dengan

kriteria “cukup”. Hal ini menunjukkan layanan publik terutama proses sertifikasi dan juga layanan pengujian pihak ke3 sudah dilakukan dengan sangat baik

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Kompetensi petugas terkait alur proses perizinan / registrasi serta komitmen petugas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha selama proses perizinan sampai terbit izin edar
- Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai Service Level Agreement (SLA)
- Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer untuk dukungan percepatan penyelesaian pekerjaan
- Layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan UMKM melalui telepon, wa, dan email terutama selama masa pandemi Covid-19.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan pemberian rekomendasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.
- Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
- Pelaksanaan desk Registrasi Pangan Olahan secara daring bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk pendampingan pengurusan izin edar BPOM serta dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM
- Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Registrasi Pangan Olahan bagi pelaku usaha secara daring dan luring bersama Direktorat Pangan Olahan
- Pelaksanaan workshop “World Food Safety Day and Spice Up The World” secara daring dan luring bersama Direktorat Pangan Olahan, serta dilakukan desk CAPA bagi pelaku usaha UMKM untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka percepatan penerbitan rekomendasi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah dilakukan secara efisien dalam mencapai output yang ditetapkan

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

- Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin edar turut mendukung dalam percepatan evaluasi dokumen dan pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
- Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain alat laboratorium, laptop, printer, komputer dan penguatan jaringan / bandwidth.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, antara lain melalui WA group dan email

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	75,00%	136,36%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II yaitu sebesar 75%, jika dibanding dengan target Triwulan II yang

ditetapkan yakni 55% maka Capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 136,36% dengan kriteria “sangat baik”. Realisasi Jika dibanding dengan target tahun 2021 yang ditetapkan yakni 55% maka Capaian kinerja sebesar 136,36% dengan kriteria “cukup”. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha produksi sudah mengalami peningkatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan CPPOB meningkat, baik MD maupun IRTP.
- Telah dilakukan penyamaan persepsi antar inspektur pangan dalam menetapkan kategori temuan, sehingga keputusan terhadap hasil pemeriksaan dapat seragam.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan guna pemenuhan CPPOB-IRTP.
- Bimtek yang dilaksanakan oleh BPOM cukup optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan CPPOB.
- Peningkatan kompetensi SDM Pemda Kabupaten/kota dalam menunjang efektifitas pengawasan, antara lain bimtek dan pelatihan Food Inspektur, Pelatihan DFI (District Food Inspector) serta pelatihan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan)
- Pemanfaatan WA untuk komunikasi lebih efektif antara petugas dengan pemilik/ penanggung jawab sarana MD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan secara efisien dalam mencapai output yang ditetapkan

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

- Telah dilakukan advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.
- Monitoring dan Evaluasi indikator perbulan sudah dilakukan sehingga apabila terdapat indikator yang tidak tercapai dapat segera dilakukan tindak lanjut

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	50,30%	79,84%	Cukup

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II yaitu sebesar 50,30%, jika dibanding dengan target Triwulan II yang ditetapkan yakni 63% maka Capaian kinerja pada Triwulan II sebesar 79,84% dengan kriteria “cukup”. Realisasi Jika dibanding dengan target tahun 2021 yang ditetapkan yakni 63% maka Capaian kinerja sebesar 79,84% dengan kriteria “cukup”. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha dibidang distribusi obat dan makanan masih cukup rendah.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan masih kurang.
- Telah dilakukan penyamaan persepsi antar inspektur pangan dalam menetapkan kategori temuan, sehingga keputusan terhadap hasil pemeriksaan dapat seragam.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Balai kepada pelaku usaha baik melalui daring, medsos maupun secara langsung sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Gorontalo dilakukan bersama dengan linsek terkait

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
12	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	3,37	2,37	75 %	Efisien

Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilakukan secara efisien dalam mencapai output yang ditetapkan

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

- Perlu adanya Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pengawasan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

- Peningkatan kompetensi inspektur pengawas Obat dan Makanan, melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop, seminar dan sosialisasi
- Monitoring dan Evaluasi indikator perbulan sudah dilakukan dengan optimal

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik di BPOM Gorontalo

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan II berdasarkan data yang diolah Biro Hukor dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik..

Adapun kategori nilai sebagai berikut :

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian untuk indikator ini baru akan mendapatkan nilai capaian final pada akhir tahun maka indikator ini belum bisa dihitung.

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan

internal process perspektif, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83%	96,04%	101,28%	Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan 2, nilai efektifitas KIE BPOM di Gorontalo sebesar **96,04** dengan target tiap triwulan tetap hingga akhir tahun 2021 yaitu sebesar **94,83** sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar **101,28%** dengan kategori “**Baik**”. Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan “**Sangat Efektif Sekali**”

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan 2 tahun 2021 sebesar 96,04. Target renstra Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 sebesar 94,83. Kinerja triwulan berikutnya harus dioptimalkan sehingga target renstra tahun 2021 dapat terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun Lalu

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020 sebesar 97,12. Sedangkan realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 sebesar 96,04. Walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 masih berada di atas target.

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Tahun Akhir Renstra 2024

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan 2 tahun 2021 sebesar 96,04. Target renstra Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 sebesar 98,67. Kinerja triwulan berikutnya harus dioptimalkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu:

1. Pembuatan materi disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan, sehingga diharapkan akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan;
2. Penganekaragaman isi materi KIE untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dari berbagai macam latar belakang;
3. Pemilihan nara sumber untuk satu topik tertentu, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Memperluas fasilitas Layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui berbagai media seperti media sosial, media online, media cetak dan media elektronik;
2. Optimalisasi subsite gorontalo.pom.go.id sebagai media informasi dan publikasi;

3. Pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh komunitas dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
4. Kegiatan edukasi dan peduli masyarakat melalui Saka POM Beraksi (Bergerak Aktif Mengedukasi).

h. Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	- 1,00	75 %	Efisien

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00%	50,00%	250,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
---	--------	--------	---------	-------------------------

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan yang dikonsumsi oleh Anak Usia Sekolah (PJAS) terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan orang tua sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan intervensi keamanan PJAS yaitu (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Sosialisasi Keamanan Pangan, (3) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, (4) Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, (5) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan (6) Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

Pelaksanaan intervensi Keamanan PJAS tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo sebanyak 10 sekolah, Kabupaten Pohuwato sebanyak 10 sekolah dan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 4 sekolah *carry over* dan 17 sekolah pengawasan tahun 2020.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi sampai dengan Triwulan 2 sebesar 50 % dari target 20 %. Target triwulan 2 sebesar 20 % dibuat menyesuaikan dengan tahun sebelumnya dimana capaian hingga triwulan 2 pada tahun 2020 sebesar 20%. Pada saat target awal disusun, belum terbit target scoring dari Direktorat PMPUPO. Pada tahun 2020 terkendala

oleh pandemi COVID-19 sehingga kegiatan mengalami penundaan hingga bulan Oktober.

Realisasi per triwulan 2 tahun 2021 melebihi target dikarenakan kegiatan-kegiatan yang pada tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena pandemi (larangan mengumpulkan banyak peserta), pada tahun 2021 ini tetap dapat dilaksanakan dengan metode baru menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kegiatan Advokasi dan Bimtek Keamanan Pangan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan sehingga jumlah peserta masih sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu pada kegiatan sosialisasi keamanan pangan, metode sosialisasi yang dilakukan diubah dari mengumpulkan peserta dari sekolah-sekolah di satu tempat menjadi jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi di masing-masing sekolah yang menjadi target intervensi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi intervensi PJAS dihitung berdasarkan scoring tahapan kegiatan sedangkan target akhir intervensi PJAS dihitung berdasarkan jumlah sekolah. Pada triwulan 2 realisasi telah mencapai 50 % dari target 20 %.

Pada tahun 2021 target sekolah yang ditetapkan sebanyak 40 sekolah. Target 40 sekolah ini terdiri dari 16 sekolah (Kabupaten Bone Bolango) yang diintervensi tahun 2020, 4 sekolah *carry over* (Kabupaten Bone Bolango) dan 20 sekolah (10 Sekolah di Kabupaten Gorontalo dan 10 sekolah di Kabupaten Pohuwato) yang merupakan target tahun 2021. Sampai triwulan 2, sebanyak 25 sekolah telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun Lalu

Target sekolah pada tahun 2020 sebanyak 16 sekolah. Target berubah dari 20 sekolah menjadi 16 sekolah karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Pada tahun 2020, realisasi yang berhasil dicapai sebanyak 17 sekolah dari target 16 sekolah.

Pada tahun 2021 target sekolah yang ditetapkan sebanyak 40 sekolah. Sampai triwulan 2, sebanyak 25 sekolah telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan.

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Tahun Akhir Renstra 2024

Target sekolah pada tahun 2024 sebanyak 107 sekolah. Pada tahun 2021 target sekolah yang ditetapkan sebanyak 40 sekolah. Sampai triwulan 2, sebanyak 25 sekolah telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab berhasilnya capaian indikator ini yaitu:

1. Komitmen yang tinggi dari kepala sekolah beserta jajarannya setelah dilakukan Sosialisasi PJAS;
2. Peran serta lintas sektor yang mendukung penuh program Intervensi Keamanan PJAS;
3. Peran serta anggota SAKA POM Gorontalo dalam membantu pelaksanaan kegiatan intervensi PJAS

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Intervensi Keamanan PJAS;
2. Sosialisasi Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah;
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan.

h. Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	3,70	2,70	75 %	Efisien

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah desa pangan aman	35%	51,60%	147,43%	Tidak Dapat Disimpulkan

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa dengan target 100 desa per tahun. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Tahapan program desa pangan aman yaitu (1) Advokasi Kelembagaan Desa, (2) Pengadaan gimmick, rapid test kit, (3) Pengawasan Desa, (4) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (5) Bimtek Komunitas Desa, (6) Fasilitasi Keamanan Pangan, (7) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, (8) Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), dan (9) Lomba Desa Pangan Aman.

Pelaksanaan intervensi Keamanan PJAS tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo sebanyak 5 desa, Kabupaten Pohuwato sebanyak 2 desa dan Kabupaten Bone Bolango sebanyak 6 desa pengawasan tahun 2020.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi sampai dengan Triwulan 2 sebesar 51,60 % dari target 35 %. Target triwulan 2 sebesar 35 % dibuat menyesuaikan dengan tahun sebelumnya. Pada saat target awal disusun, belum terbit target scoring dari Direktorat PMPUPO.

Realisasi per triwulan 2 tahun 2021 melebihi target dikarenakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan 3 yaitu Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Desa dan Intesifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Pre Intervensi dapat dilakukan di triwulan 2.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Desa Pangan Aman dihitung berdasarkan scoring tahapan kegiatan sedangkan target akhir Desa Pangan Aman dihitung berdasarkan jumlah desa. Pada triwulan 2 realisasi telah mencapai 51,60 % dari target 35 %.

Pada tahun 2021 target desa yang ditetapkan sebanyak 12 desa. Target 12 desa ini terdiri dari 6 desa (Kabupaten Bone Bolango) yang merupakan desa yang diintervensi tahun 2020, 5 Desa di Kabupaten Gorontalo dan 2 Desa di Kabupaten Pohuwato yang merupakan target desa yang diintervensi tahun 2021. Sampai triwulan 2, sebanyak 7 desa telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Pre Intervensi.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun Lalu

Target desa pada tahun 2020 sebanyak 6 sekolah. Target berubah dari 6 desa menjadi 5 desa karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Pada tahun 2020, realisasi yang berhasil dicapai sebanyak 6 desa dari target 5 desa.

Pada tahun 2021 target desa yang ditetapkan sebanyak 7 desa. Sampai triwulan 2, sebanyak 7 desa telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Pre Intervensi.

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Tahun Akhir Renstra 2024

Target desa pada tahun 2024 sebanyak 31 Desa. Pada tahun 2021 target desa yang ditetapkan sebanyak 12 desa. Sampai triwulan 2, sebanyak 7 desa telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Desa dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Pre Intervensi..

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab berhasilnya capaian indikator ini yaitu:

1. Komitmen yang tinggi dari Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya setelah dilakukan audiensi dan advokasi kelembagaan desa;

2. Peran serta lintas sektor yang mendukung penuh program Desa Pangan Aman.
- f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa menghadirkan instansi lintas sektor terkait dan perangkat desa;
2. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 15 kader tiap desa;
3. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Pre Intervensi;
4. Bimtek Komunitas Desa dengan target sebanyak 50 masyarakat per desa;

- h. Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
16	Jumlah desa pangan aman	5,46	4,46	75 %	Efisien

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60,00%	65,00%	108,33%	Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi sampai dengan Triwulan 2 sebesar 65 % dari target 60 %. Target triwulan 2 sebesar 60 % dibuat menyesuaikan dengan tahun sebelumnya. Pada saat target awal disusun, belum terbit target scoring dari Direktorat PMPUPO.

Realisasi per triwulan 2 tahun 2021 melebihi target dikarenakan terdapat kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan 3 yaitu Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat dilakukan di triwulan 2.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dihitung berdasarkan scoring tahapan kegiatan sedangkan target akhir Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dihitung berdasarkan jumlah pasar. Pada triwulan 2 realisasi telah mencapai 65 % dari target 60 %.

Pada tahun 2021 target pasar yang ditetapkan sebanyak 2 pasar. Target 2 pasar ini terdiri dari 1 pasar di Kabupaten Bone Bolango yang diintervensi tahun 2020 dan 1 pasar di Kabupaten Gorontalo yang merupakan target desa yang diintervensi tahun 2021. Sampai triwulan 2, sebanyak 1 pasar telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pengelola Pasar, Kampanye Pasar dan Monev Tahap 1. Sedangkan 1 pasar telah diintervensi Monev Tahap 1.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap tahun Lalu

Target pasar pada tahun 2020 sebanyak 1 pasar. Pada tahun 2020, realisasi yang berhasil dicapai sebanyak 1 pasar sesuai dengan target.

Pada tahun 2021 target desa yang ditetapkan sebanyak 2 pasar. Sampai triwulan 2, sebanyak 1 pasar telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pengelola Pasar, Kampanye Pasar dan Monev Tahap 1. Sedangkan 1 pasar telah diintervensi Monev Tahap 1.

d. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Tahun Akhir Renstra 2024

Target pasar pada tahun 2024 sebanyak 6 pasar. Pada tahun 2021 target pasar yang ditetapkan sebanyak 2 pasar. Sampai triwulan 2, sebanyak 1 pasar telah diintervensi tahap Advokasi Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pengelola Pasar, Kampanye Pasar dan Monev Tahap 1. Sedangkan 1 pasar telah diintervensi Monev Tahap 1.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab berhasilnya capaian indikator ini yaitu :

1. Komitmen yang tinggi dari Petugas Pasar setelah dilakukan audiensi dan Advokasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
2. Peran serta lintas sektor yang mendukung penuh program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

f. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menghadirkan instansi lintas sektor terkait dan petugas pasar;
2. Pelaksanaan Bimtek Petugas Pasar terhadap 2 personel yang dilatih melakukan pengambilan sampel dan uji cepat bahan berbahaya yang biasa disalahgunakan pada pangan;
3. Kampanye Pasar aman dengan pembagian produk informasi kepada komunitas pasar;
4. Pengambilan sampel dan uji cepat secara mandiri oleh petugas pasar;

h. Evaluasi capaian tingkat efisiensi indikator triwulan II

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3,58	2,58	75 %	Efisien

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Nama Indikator	Volume	Kriteria
----------------	--------	----------

	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	32,43%	33,96%	Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di Balai POM di Gorontalo sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah dari target sebesar 95,50%, sehingga capaian yang diperoleh sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 sebesar 32,43% dengan criteria sangat kurang karena dibandingkan terhadap target tahunan. Capaian akhir target kinerja akan menjadi meningkat pada saat akhir tahun setelah seluruh sampel selesai dilakukan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di Balai POM di Gorontalo sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah dari target sebesar 95,50%, sehingga capaian yang diperoleh sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 sebesar 32,43% dengan criteria sangat kurang karena dibandingkan terhadap target tahunan. Capaian akhir target kinerja akan menjadi meningkat pada saat akhir tahun setelah seluruh sampel selesai dilakukan pengujian.

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,08	0,08	100 %	Efisien

Dari Tabel di atas dapat dilihat Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh nilai 0,08. Semakin rendah nilai TE maka semakin

efisien suatu kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	10,95	11,45%	Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di Balai POM di Gorontalo sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah dari target sebesar 95,50%, sehingga capaian yang diperoleh sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 sebesar 11,45% dengan criteria sangat kurang karena dibandingkan terhadap target tahunan. Capaian akhir target kinerja akan menjadi meningkat pada saat akhir tahun setelah seluruh sampel selesai dilakukan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di Balai POM di Gorontalo sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 adalah dari target sebesar 95,50%, sehingga capaian yang diperoleh sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 sebesar 11,45% dengan criteria sangat kurang karena dibandingkan terhadap target tahunan.

Capaian akhir target kinerja akan menjadi meningkat pada saat akhir tahun setelah seluruh sampel selesai dilakukan pengujian.

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,51	35,51	75 %	Efisien

Dari Tabel di atas dapat dilihat Nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh nilai 35,51.. Semakin rendah nilai TE maka semakin efisien suatu kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Gorontalo mampu menghasilkan output kinerja yang optimal untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis dengan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Sasaran Kegiatan 7

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.7. Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 2 tahun 2021

Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan II Tahun 2021 adalah 58.33 % dari target sebesar 40% sehingga capaian diperoleh pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 145.83% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2021 terhadap Target Tahun 2021

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 58.33%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 81%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 72.01%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target kinerja pada Triwulan II Tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Komitmen yang baik dari PPNS dan Staf Kelompok Substansi Penindakan BPOM di Gorontalo dalam menyelesaikan berkas perkara yang sedang ditangani. Ada 3 berkas perkara carry over dua perkara telah P21 satu perkara di SP3 sementara dari target 6 tahun 2021, dua perkara telah P21 dan dua perkara lain telah tahap 1, sementara 2 perkara telah dikirim SPDP.
- b. Komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan Korwas PPNS Polda Gorontalo dan Lintas sektor lain seperti Satpol PP, LANAL TNI AL dan BAIS TNI AD turut membantu kinerja PPNS di Gorontalo dan JPU Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam penanganan berkas perkara sehingga memperlancar penanganan berkas perkara.

Namun, dalam mencapai kinerja selama Triwulan II Tahun 2021, BPOM di Gorontalo masih menemukan kendala sebagai berikut:

- a. Jumlah PPNS di Kelompok substansi Penindakan cuma satu orang sementara Staf belum dapat dikirim Pelatihan karena belum genap 2 tahun sebagai PNS. sebagai salah satu syarat mengikuti pelatihan PPNS.
- b. Beberapa perkara baik tersangka maupun saksi berada diluar Provinsi Gorontalo .
- c. Ada intervensi dari (oknum) Personil TNI AD dalam penyelesaian berkas perkara

- d. Pendamping dari Kepolisian tidak optimal dalam proses permintaan penahanan dan penangkapan terkait penyalahgunaan OOT disebabkan perlu dilakukan gelar perkara secara lengkap yang dihadiri oleh Direktur Kriminal Khusus dan ke empat subdirektorat yang hanya bisa dilakukan di hari kerja sementara penindakan dilaksanakan di hari sabtu dan batas penangkapan adalah 1 x 24 jam hal ini berpotensi tersangka melarikan diri.
- e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
1. Keberhasilan pencapaian target kinerja bidang Penindakan ditunjang program/ kegiatan yang terlaksana dengan baik, yaitu:
 2. Melakukan operasi penindakan dalam kondisi dan waktu diluar jam kerja normal yang bertujuan meningkatkan keberhasilan operasi penindakan
 3. Merevisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di substansi Penindakan.
 4. Koordinasi/konsultasi ketika dilakukan penindakan dan konsultasi kepada Kejaksaan Tinggi terkait kemungkinan perkara yang akan terjadi dan langkah langkah yang harus dilakukan Penyidik ketika di TKP misal penggunaan pasal percobaan dan hal hal yang harus dipenuhi sehingga Penyidik dapat fokus mencari alat bukti yang dibutuhkan.
 5. Briefing kepada petugas ketika dilakukan penindakan untuk mencegah hal penting terlewat dilakukan dilakukan pada saat di TKP.
 6. Monitoring dan evaluasi Kegiatan yang rutin dilaksanakan baik terkait capaian perkara maupun terkait anggaran kegiatan

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

A.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator yaitu Indeks RB BPOM di Gorontalo dan Nilai AKIP BPOM di Gorontalo.

A.8.1. Indeks RB BPOM di Gorontalo

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks RB BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun maka penilain belum bisa dihitung

A.8.2. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM di Gorontalo adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPOM di Gorontalo.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai AKIP BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun maka penilaian belum bisa dihitung

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja Optimal

A.9 Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun maka penilaian belum bisa dihitung

Sasaran Kegiatan 10 **Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi** **Pengawasan Obat dan Makanan**

A.10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal.

A.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pertama yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun, maka sampai triwulan ke II belum bisa dihitung

A.10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - 1) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun indllidu.

Indeks pengelolaan data dan informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional.

Dari Hasil nilai asesment indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan ke II BPOM di Gorontalo 2 nilai tersebut lebih tinggi dari target sebesar 1.35.

Tabel 3.27 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal</i>	2	1,35	67,50%	kurang

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

A.11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo.

A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran

Capaian Nilai: 83,33 (Cukup)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM

12. Pagu Minus

13. Konfirmasi Capaian Output

Perhitungan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2011 bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan (3) evaluasi implementasi yang diukur menggunakan empat indikator, yaitu (a) penyerapan anggaran, (b) konsistensi perencanaan dan implementasi, (c) pencapaian output, dan (d) efisiensi.

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90%	75%	83,33%	Cukup

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Beberapa kegiatan Balai dilakukan penjadwalan ulang/ penyusunan rencana pelaksana kegiatan dengan menyesuaikan kondisi pemberlakuan PPKM yang berlaku di daerah sehingga beberapa kegiatan yang dijadwalkan Luring (tatap Muka) di Tunda pelaksanaannya

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE	Status
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1,87	0,87	88 %	Efisien

Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

- a. Melakukan penyesuaian kegiatan melalui Revisi anggaran dengan mempertimbangkan bahwa beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara langsung sehingga pola kegiatan dilakukan secara daring/online
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring Anggaran secara berkala
- c. Melakukan percepatan pembayaran keuangan

A.11.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai: 112,36 (Baik)

Nama Indikator	Volume			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90%	75%	83,33%	Cukup

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input, di TW II realisasi persentase tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 75% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

Pengelolaan keuangan secara akuntabel dirasakan masih belum optimal, hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPOM di Gorontalo salah satu dengan melihat kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM di Gorontalo. Kualitas dapat dilihat melalui angka atau *score* capaian indikator. Angka ini dapat berfungsi sebagai peringatan dini atas area-area akuntabilitas pengelolaan keuangan yang

memerlukan perbaikan, serta dapat pula digunakan untuk membandingkan capaian antar periode maupun antar unit pelaporan.

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh BPOM di Gorontalo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada Tahun 2021 :

1. BPOM di Gorontalo menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
2. Mengunggah / mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi e-performace, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/capaianUPTtahun2021;
3. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 14.419.727.000,- (empat belas miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp 6.326.602.358,- (28,55%).

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar 94,98 %, dengan rincian sebagaimana pada :

*Tabel 3.28 Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
BPOM di Gorontalo Triwulan I Tahun 2021*

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	3165.ADD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.530.706.000	480.657.961	31,40
2	3165.AEA.001 Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Balai POM di Gorontalo	113.113.000	4.140.000	3,66
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Gorontalo	56.162.000	10.199.000	18,16
4	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh Balai POM di Gorontalo	600.000.000	164.164.400	27,36
5	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.440.676.000,00	357.848.930	24,84
6	3165.BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Gorontalo	124.000.000	34.501.404	27,82
7	3165.CAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	4.533.890.000	0	-
8	3165.CAB.002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo	90.000.000,00	81.450.000	90,50
9	3165.CAB.003 Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.870.000.000,00	0	-
10	3165.QCD.U01 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM di Gorontalo	571.770.000	238.330.734	41,68
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	711.488.000	325.913.525	45,81
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	930.603.000	382.813.857	41,14
13	3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	101.119.000	43.569.860	43,09
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Gorontalo	246.080.000	167.630.515	68,12

15	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Gorontalo	556.080.000	93.669.495	16,84
16	3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Balai POM di Gorontalo	38.060.000	17.933.000	47,12
17	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Gorontalo	88.474.000	11.043.400	12,48
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Gorontalo	817.506.000	193.724.200	23,70
19	6348.EAA.004 Layanan Perkantoran Balai POM di Gorontalo	7.741.855.000,00	3.719.012.077	48,04
	Total	22.161.582.000	6.326.602.358	28,55

B POM di Gorontalo senantiasa memperbaiki pengelolaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan anggaran yang sehat di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah perencanaan perbaikan pengelolaan anggaran yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2021, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk bersinergi dengan BNPB dalam melaksanakan penanggulangan bencana Covid-19.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh B POM di Gorontalo antara lain :

1. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan 1

2. Sinkronisasi kegiatan terpadu Pusat dan Balai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM yang mungkin terdampak dengan kebijakan *refocusing*;
3. *Review* target pelaksanaan kegiatan
4. Pelaksanaan evaluasi anggaran dilaksanakan secara periodik dan berkala dari penanggungjawab kegiatan.

BAB II

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja interim II

tahun 2021 Balai POM di Gorontalo menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 114,83 % dengan kriteria sangat baik
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 105,50% dengan kriteria sangat baik
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 107,53% dengan kriteria Sangat baik
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 109,11% dengan kriteria sangat baik
2. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan public di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 112,36% dengan kriteria sangat baik
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 75% dengan kriteria Cukup
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 113,644%.dengan kriteria Sangat Baik

- d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 136,36% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79,84% dengan kriteria Cukup
3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan sebesar 101,28%. dengan sangat baik
 - b. Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) sebesar 250%. Dengan kriteria tidak dapat disimpulkan
 - c. Jumlah desa pangan aman sebesar 147,43% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sebesar 108,33% dengan kriteria sangat Baik
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 33,96% dengan kriteria sangat kurang
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 11,45% dengan kriteria sangat kurang
5. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan capaian sebesar 72,01% (Cukup) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP belum bisa dihitung

- b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Gorontalo yang optimal sebesar 67,50% dengan kriteria Kurang
11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo sebesar 85,30%. Dengan kriteria Cukup
 - b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo sebesar 83,33%. Dengan kriteria cukup

4.2 . SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 Triwulan II, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. melakukan penyesuaian kegiatan dan melakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai akhir tahun.
2. Komitmen Pengelola kegiatan untuk selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan disepakati.
3. Agar melakukan pemantuan terhadap kegiatan dan memonitoring capaian sasaran strategis yang tidak mencapai target secara periodik
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
5. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM Gorontalo.
6. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

LAMPIRAN



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Yudi Prayudana. S.Farm., Apt
Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.

Pihak Pertama



Agus Yudi Prayudana. S.Farm., Apt



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	92
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	84
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	77



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	71
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	Efisien (90%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 14.419.727.000,-
Rp. 8.143.859.000,-

Gorontalo, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, M.C.P.

Kepala Balai POM di Gorontalo



Agus Yudi Prayudana. S.Farm., Apt

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	316.680.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	154.589.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	239.400.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	129.551.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	73	124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84,5	4.362.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	150.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	90	150.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	272.502.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	272.502.000



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	51.800.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	88.474.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	272.502.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	3,76	150.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83	94,83	94,83	94,83	150.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	35%	40	711.488.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	35%	80%	12	903.603.00
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	20%	60%	80%	2	101.119.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5	95,5	95,5	95,5	765.353.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5	95,5	95,5	95,5	765.353.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	40	60	81	684.883.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	-	-	-	92	409.573.000
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	-	-	-	84	621.530.000
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	-	-	-	77	409.573.000



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	-	-	-	71	6.493.890.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2	2	2	2	84.550.000
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	25	50	70	94	2.439.309.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	5.620.000.000

Gorontalo, 21 Desember 2020

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo



Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL TRIWULAN

Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juli 2021 Bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 Nama : Agus Yudi Prayudana, S.Farm.,Apt
 NIP : 19840225 200712 1 001
 Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
- 2 Nama : Andi Herman Andi Tantu, SE
 NIP : 198005102009121003
 Jabatan : Ketua TIM Evaluasi Internal Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Periode 01 April S/D 30 Juni 2021 dengan Hasil Sebagai Berikut :

1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output s/d Triwulan 2

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)
1	3165.ADD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	37%	1.530.706.000	480.657.961	31,40
2	3165.AEA.001 Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Balai POM di Gorontalo	3	0	28%	113.113.000	4.140.000	3,66
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Balai POM di Gorontalo	3	0	35%	56.162.000	10.199.000	18,16
4	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh Balai POM di Gorontalo	400	125	31,25%	600.000.000	164.164.400	27,36
5	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	-	40%	1.440.676.000,00	357.848.930	24,84
6	3165.BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Gorontalo	26	8	19,23%	124.000.000	34.501.404	27,82
7	3165.CAB.001Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	-	20%	4.533.890.000	0	-
8	3165.CAB.002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo	1	-	20%	90.000.000,00	81.450.000	90,50
9	3165.CAB.003 Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	-	20%	1.870.000.000,00	0	-
10	3165.QCD.U01 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM di Gorontalo	6	3	50%	571.770.000	238.330.734	41,68
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40	20	50,00%	711.488.000	325.913.525	45,81
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	12	12	51,60%	930.603.000	382.813.857	41,14
13	3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	65,00%	101.119.000	43.569.860	43,09
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Gorontalo	388	43	11%	246.080.000	167.630.515	68,12
15	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Balai POM di Gorontalo	1050	343	32,67%	556.080.000	93.669.495	16,84
16	3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh Balai POM di Gorontalo	70	70	100%	38.060.000	17.933.000	47,12



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
 Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
 E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

17	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Gorontalo	45	4	8,89%	88.474.000	11.043.400	12,48
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Balai POM di Gorontalo	810	328	40,49%	817.506.000	193.724.200	23,70
19	6348.EAA.004 Layanan Perkantoran Balai POM di Gorontalo	1	0	48%	7.741.855.000,00	3.719.012.077	48,04
					22.161.582.000	6.326.602.358	28,55

2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis s/d Triwulan 2

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/d) x 100	g	h	i=(h/g) x 100
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	96,00%	114,83%	Rp 316.680.000	0	-
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	84,40%	105,50%	Rp 154.589.000	125.236.760	81,01
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00%	93,55%	107,53%	Rp 239.400.000	93.669.495	39,13
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	89,47%	109,11%	Rp 129.551.000	60.326.755	46,57
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	0	0	0,00%	Rp 124.000.000	34.501.404	27,82
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0,00%	Rp 4.362.000	3.609.000	82,74
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0%	0	0,00%	Rp 150.000.000	41.041.100	27,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0%	0	0,00%	Rp 150.000.000	41.041.100	27,36
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	100%	112,36%	Rp 272.502.000	64.574.733	23,70
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%	45%	75,00%	Rp 272.502.000	64.574.733	23,70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	100,00%	113,64%	Rp 51.800.000	6.590.000	12,72
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	75,00%	136,36%	Rp 88.474.000	11.043.400	12,48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	50,30%	79,84%	Rp 272.502.000	64.574.733	23,70
		Indeks Pelayanan Publik	0	0	0,00%	Rp 150.000.000	41.041.100	27,36



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax. : (0435) 822052
E-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83%	96,04%	101,28%	Rp 150.000.000	41.041.100	27,36
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00%	50,00%	250,00%	Rp 711.488.000	325.913.525	45,81
		Jumlah desa pangan	35%	51,60%	147,43%	Rp 930.603.000	382.813.857	41,14
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60,00%	65,00%	108,33%	Rp 101.119.000	43.569.860	43,09
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	32,43%	33,96%	Rp 765.353.000	240.328.981	31,40
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	10,95%	11,45%	Rp 765.353.000	240.328.981	31,40
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00%	58,33%	72,01%	Rp 684.883.000	242.470.734	35,40
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB UPT	0%	0	0,00%	Rp 409.573.000	100.422.637	24,52
		Nilai AKIP UPT	0%	0	0,00%	Rp 621.530.000	157.003.657	25,26
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0%	0	0,00%	Rp 409.573.000	100.422.637	24,52
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0,00%	Rp 6.493.890.000	81.450.000	1,25
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2%	1,35%	67,50%	Rp 84.550.000	21.388.100	25,30
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94%	80,18%	85,30%	Rp 2.439.309.000	1.112.331.632	45,60
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90%	75%	83,33%	Rp 5.217.996.000	2.585.292.345	49,55
						22.161.582.000	6.326.602.358	28,55

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Juli 2021
Kepala Balai POM di Gorontalo



Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt

No	Indikator	Target triwulanan (kumulatif)				Definisi	Realisasi per Triwulan (Kumulatif)								Capaian terhadap target TW (kumulatif)												
		Target 2021	Target triwulanan (kumulatif)				TW I (Jan - Feb)		TW II (Mar - Apr)		TW III (Maj - Jun)		TW IV (Jul - Sep)		TW I (Jan - Feb)		TW II (Mar - Apr)		TW III (Maj - Jun)		TW IV (Jul - Sep)						
			TW I (Jan)	TW II (Jan-Feb)	TW III (Jan-Feb-Maj)		TW IV (Jan-Feb-Maj-Jun)	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi					
1	Persentase Obat yang memenuhi persyaratan Makanan yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	39	43	90,70%	240	250	96,00%	240	250	96,00%	240	250	96,00%	240	250	96,00%	108,48%	114,83%	114,83%	114,83%
2	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	30	42	71,43%	92	109	84,40%	92	109	84,40%	92	109	84,40%	92	109	84,40%	89,29%	105,50%	105,50%	105,50%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	32	34	94,12%	87	93	93,55%	87	93	93,55%	87	93	93,55%	87	93	93,55%	108,18%	107,53%	107,53%	107,53%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	0	0	#DIV/0!	17	19	89,47%	17	19	89,47%	17	19	89,47%	17	19	89,47%	0	109,11%	109,11%	109,11%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,00%	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,50%	0,00%	0,00%	0,00%	94,50%	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76%	0%	0%	0%	76%	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90%	0,00	0,00	0,00	90%	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Direktorat Utama		-	-	#N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	89,00%	Hasil 1% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + 1% rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + 1% rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT s.d triwulan n	Jumlah 1% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + 1% rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT s.d triwulan n	28	28	100	44	44	100	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1235,96%	1235,96%	0	0
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	Hasil 1% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan n	Jumlah 1% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan n	14	28	50	20	44	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	83,33%	7575,76%	0	0
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	100,00%	73	73	100,00%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	113,64%	113,64%	0	0
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk diperiksa s.d triwulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n	2	2	100,00%	3	4	75,00%	1	2	50,00%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	181,82%	136,36%	90,91%	0
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n	121	217	55,76%	185	328	50,30%	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	88,51%	79,85%	0	0
14	Indeks Pelayanan Publik	3,76%	0,00	0,00	0,00	3,76%	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPT BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
15	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,83%	94,83%	94,83%	94,83%	94,83%	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP		-	-	97,68	-	-	96,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10300,54%	10127,60%	0,00%	0,00%
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan	49%	10,00%	20,00%	35,00%	49%	Hasil progres capaian selisih triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan target progres ...%		-	-	20,00%	-	-	50,00%	-	-	50,00%	-	-	50,00%	-	-	50,00%	2,00%	390,00%	142,86%	125,00%
17	Jumlah desa pangan aman	12%	20%	35%	60,00%	12%	Hasil progres capaian selisih triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan target progres ...%		-	-	35,70%	-	-	51,60%	-	-	51,60%	-	-	51,60%	-	-	1,79%	147,43%	64,50%	4,30%	
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2%	20,00%	60,00%	80,00%	2%	Hasil progres capaian selisih triwulan pada kolom realisasi (kolom O,R,U) dengan target progres ...%		-	-	45,00%	-	-	65,00%	-	-	65,00%	-	-	65,00%	-	-	2,25%	108,33%	51,25%	32,56%	
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	-	7,18%	-	-	32,43	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	7,53%	3395,66%	0	0
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d triwulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d tahun n	-	-	12,37%	-	-	10,93	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	12,56%	1146,97%	0	0
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00%	15,00%	40,00%	60,00%	81,00%	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara tertampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.		-	-	33,70%	-	-	58,33%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	224,69%	146,83%	0,00%	0,00%
22	Indeks RB UPT	92%	0,00	0,00	0,00	92%	Hasil indeks RB dari itema		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
23	Nilai AKIP UPT	84%	0,00	0,00	0,00	84%	Hasil nilai AKIP dari itema		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77%	0,00	0,00	0,00	77%	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	71,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,00%	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
26	Indeks pengolahan data dan informasi UPT yang akurat	2%	0,00	0,00	0,00	2%	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	1,38%	-	-	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94%	0,00	0,00	0,00	94%	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	-	29,50%	-	-	80,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!	0	0	0	0,00%
28	Tingkat Efisiensi Penganggaran Anggaran UPT	90%	90%	90%	90%	90%			-	-	75%	-	-	75%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	83,33%	83,33%	0	0

LAMPIRAN 2
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM
TRIWULAN 2 TAHUN 2021

No.	BB/BPOM	Target Tahun 2021	Jumlah Responden s/d TW2-2021	Indeks TW 2 - 2021 (akumulasi TW 1)
UNIT PELAKSANA TEKNIS			6805	93,49
A	REGIONAL SUMATERA		3828	93,88
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	85,60	262	92,84
2	Balai Besar POM di Medan	90,99	1220	95,10
3	Balai Besar POM di Padang	90,64	962	92,38
4	Balai Besar POM di di Pekanbaru	88,58	271	92,34
5	Balai POM di Jambi	87,92	147	91,97
6	Balai Besar POM di Palembang	92,50	125	97,45
7	Balai POM di Bengkulu	85,71	183	97,93
8	Balai Besar POM di di Bandar Lampung	88,35	246	92,52
9	Balai POM di Pangkal Pinang	91,68	182	91,74
10	Balai POM di Batam	85,53	230	94,48
B	REGIONAL JAWA		1165	91,74
11	Balai Besar POM di Jakarta	90,99	129	94,27
12	Balai Besar POM di Bandung	89,18	170	91,01
13	Balai Besar POM di Semarang	86,00	175	92,41
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	88,58	253	92,91
15	Balai Besar POM di Surabaya	91,10	91	88,44
16	Balai Besar POM di Serang	87,56	347	91,38
C	REGIONAL BALI NUSRA		1143	93,03
17	Balai Besar POM di Denpasar	90,95	269	93,44
18	Balai Besar POM di Mataram	89,53	682	92,79
19	Balai POM di Kupang	87,46	192	92,85
D	REGIONAL KALIMANTAN		1154	92,49
20	Balai Besar POM di Pontianak	88,39	194	91,58
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	88,35	295	93,96
22	Balai Besar POM di Banjarmasin	85,41	271	92,11
23	Balai Besar POM di Samarinda	90,94	394	92,29
E	REGIONAL SULAM PAPUA		2124	93,93
24	Balai Besar POM di Manado	86,91	535	91,14
25	Balai POM di Palu	88,73	152	91,97
26	Balai Besar POM di di Makassar	86,87	152	91,87
27	Balai POM di Kendari	91,28	393	92,91
28	Balai POM di Gorontalo	94,83	111	96,04
29	Balai POM di Mamuju	79,18	130	96,47
30	Balai POM di Ambon	90,14	111	94,00
31	Balai POM di Sofifi	87,41	200	94,79
32	Balai POM di Manokwari	85,10	169	96,74
33	Balai Besar POM di Jayapura	88,69	171	93,35